

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG DAMPAK
PRAKTEK *DROP ORDER* BARANG
AKIBAT WANPRESTASI
(Studi Di Toko Bangunan Bogi Jaya Gisting Tanggamus)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

Nama : Desi Selvia

Npm : 1421030095

Jurusan :Muamalah

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
2018**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG DAMPAK
PRAKTEK *DROP ORDER* BARANG
AKIBAT WANPRESTASI**
(Studi di Toko Bangunan Bogi Jaya Gisting Tanggamus)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syariah

Oleh:

Desi Selvia

NPM: 1421030095

Program Studi: Muamalah



Pembimbing I: Dr. H. Khoirul Abror, M.H.

Pembimbing II: Eti Karini, S.H., M.Hum.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG DAMPAK PRAKTEK *DROP ORDER* BARANG AKIBAT WANPRESTASI (Studi di Toko Bangunan Bogi Jaya Gisting Tanggamus)

**Oleh:
Desi Selvia**

Kegiatan jual beli dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari kebutuhan yang di inginkan. Bahkan jual beli itu sendiri sekarang cenderung fleksibel dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan kalangan masyarakat seperti jual beli bahan bangunan secara *Drop Order* yang menyerupai akad *salam* (pesanan). Jual beli ini merupakan suatu akad dengan pengiriman pemesanan barang oleh penjual pada waktu yang telah di tentukan dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli saat akad berlangsung. Namun pada pelaksanaannya terkadang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli yang membatalkan *Drop Order* barang sebelum jatuh tempo sebagaimana kasus di toko bangunan Bogi Jaya di Gisting Tanggamus.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktek pelaksanaan *drop order* barang di Toko Bangunan Bogi Jaya dan apa dampak dari praktek DO tersebut yang apabila menyalahi perjanjian? dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktek *drop order* barang di toko bangunan Bogi Jaya di Gisting Tanggamus? sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek pelaksanaan *drop order* barang di Toko Bangunan Bogi Jaya dan apa dampak dari praktek DO tersebut yang apabila menyalahi perjanjian dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktek *drop order* barang di toko bangunan Bogi Jaya di Gisting Tanggamus.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul diolah melalui proses editing dan sistematika. Sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan dalam prakteknya perjanjian tersebut tidak sesuai dengan perjanjian awal atau teori yang sudah disepakati, dimana pihak pembeli ingin mengambil kembali uang yang telah di*drop orderkan* untuk bahan bangunan tersebut sebelum jatuh tempo, sehingga kejadian tersebut berdampak pada pihak toko yang mengalami kerugian, baik waktu dan barang. Adapun dampak yang ditimbulkan bisa berupa dampak positif ataupun negatif untuk pihak pemilik toko maupun pembeli. Dari tinjauan pandangan hukum Islam praktek pelaksanaan *drop order* barang yang ada di toko bangunan Bogi Jaya Gisting Tanggamus ini tidak sesuai dengan hukum Islam, karena jual beli yang dilakukan antara toko Bogi Jaya dengan pembeli mengandung unsur *al-qharar* yaitu ada unsur *kemudharatan* bagi pihak pemilik toko, *kemudharatan* yang

dimaksud adalah kerugian akibat perjanjian yang dilakukan diawal, Sebab pembeli membatalkan perjanjian *drop order* untuk mengambil kembali uangnya yang telah digunakan untuk di *DO* kan sebelum jatuh tempo. Dan dalam hukum Islam perjanjian harus dihormati, tidak boleh menyalahi salah satu dari hukum-hukum syariat, perjanjiannya harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, tidak boleh mencurangi salah satu pihak, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 704030

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : Desi Selvia
NPM : 1421030095
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG DAMPAK
PRAKTEK DROP ORDER BARANG AKIBAT
WANPRESTASI (Studi di Toko Bangunan Bogi Jaya
Gisting Tanggamus)**

MENYETUJUI


Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 12 November 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Khoirul Abror, M.H.
NIP. 195704031987031003


Eti Karini, S.H., M.Hum.
NIP. 197308162003122003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah


Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG DAMPAK PRAKTEK DROP ORDER BARANG AKIBAT WANPRESTASI (Studi di Toko Bangunan Bogi Jaya Gisting Tanggamus)** disusun oleh : **Desi Selvia, NPM : 1421030095, Jurusan : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah),** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum, pada hari/tanggal : **Selasa, 18 September 2018, pukul: 13.30-15.30 WIB**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs.H. Irwantoni, M.Hum

(.....)

Sekretaris : Dani Amran Hakim, S.H., M.H

(.....)

Penguji I : Dr. H. Khairuddin, M.H.

(.....)

Penguji II : Dr. H. Khoirul Abror, M.H.

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 1970090611997031002**

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ﴿٢٨٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan Shendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. QS. Al-Baqarah (2): 282



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan penuh syukur kepada Allah SWT skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta, Ayahanda Supriyadi dan Ibunda Rumini yang telah melindungi, mengasuh, menyayangi dan mendidik saya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan jasmani dan rohani, rizki yang banyak dan berkah, panjang umur, amin. Berkat restu nyalah sehingga dapat menyelesaikan kuliah ini. Semoga semua ini merupakan hadiah terindah untuk orang tuaku.
2. Kakakku tersayang Eko ferdinan Muda dan Anggun Gita Dwi Lestari, Adikku Refo Surya Sandi yang secara tidak langsung telah memberi motivasi dan semangat.
3. Almamater tercinta Fakultas Syariah (UIN Raden Intan Lampung) yang telah mendewasakan pandangan dan pikiranku.

RIWAYAT HIDUP

Desi Selvia dilahirkan di Kotaagung pada tanggal 17 Desember 1995, anak ketiga dari empat bersaudara dari Bapak Supriyadi dan Ibu Rumini.

Pendidikan sekolah dasar ditempuh di SDN 2 Kampung Baru Kotaagung Timur Tanggamus yang diselesaikan pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan kesekolah menengah pertama ditempuh di SMPN 1 Gisting Tanggamus diselesaikan pada tahun 2011. Sedangkan pendidikan menengah atas ditempuh di SMAN 2 Kotaagung Pusat dan diselesaikan pada tahun 2014. Kemudian meneruskan pendidikan S1 ke Perguruan Tinggi Islam pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah (UIN) Raden Intan Lampung di Provinsi Lampung.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam saya haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Strata Satu (S1) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Skripsi ini tersusun sesuai dengan rencana dan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun tidak lupa menghaturkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak H.A.Khamedi Ja'far, S.Ag.M.H., selaku Ketua Jurusan Muamalah, dan Khoiruddin, M.Si selaku Sekjur Muamalah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa mengarahkan dan memberi motivasi sehingga terselesaikan skripsi ini.

4. Bapak Dr. H. Khoirul Abror, M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Eti Karini, S.H., M.Hum selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen dilingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama di bangku kuliah.
6. Bapak sugio selaku pemilik toko serta karyawan-karyawannya di toko bangunan Bogi Jaya Kecamatan Gisting Kab.Tanggamus yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.
7. Rekan-rekan Muamalah B angkatan 2014 yang telah memberikan bantuan dan dukungan moril khususnya pada sahabat terbaik ku Mutiara Awaliyah, Yulia Dinda, Siti Rachma Wati, Umi Nurohma, Nugraheni Pajar Prastiwi, Liana Putri, Gita Anggraini, Arief, Redho.
8. *My dearest* Muhammad Iip. J.M, yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
9. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahnya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga dapat bermanfaat khususnya dan umumnya para pembaca, atas bantuan dan partisipasinya yang diberikan semoga menjadi amal ibadah disisi

Allah SWT dan mendapatkan balasan yang setimpal. Amin
Yarobbal'alam

Bandar Lampung, Oktober 2018

Penulis,

Desi Selvia

NPM. 1421030095



DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
F. Metodologi Penelitian	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Hukum Islam	13
1. Pengertian Akad.....	13
2. Dasar Hukum Akad	16
3. Rukun dan Syarat Akad	17
4. Macam-macam Akad.....	21
5. Asas-asas Akad.....	28
6. Berakhirnya Akad.....	31
B. Jual Beli Salam.	33
1. Pengertian Jual Beli Salam.....	33
2. Landasan Hukum Jual Beli Salam	36
3. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam	38
4. Perbedaan antara Jual Beli Salam dengan Jual Beli Biasa.....	45
5. Batalnya Jual Beli Salam.....	46
C. Sistem <i>Drop Order</i>	47

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Toko Bangunan Bogi Jaya.....	49
1. Sejarah Toko Bangunan Bogi Jaya	49
2. Letak Toko Bangunan Bogi Jaya.....	51
3. Bentuk Badan Usaha Toko Bangunan Bogi Jaya	51

B. Mekanisme Jual Beli Di Toko Bangunan Bogi Jaya	53
1. Cara Pembayaran Di Toko Bangunan Bogi Jaya	53
2. Perjanjian Yang Diterapkan di Toko Bangunan Bogi Jaya	54
C. Pelaksanaan <i>Drop Order</i> di Toko Bogi Jaya	57
D. Dampak	60

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Pelaksanaan <i>Drop Order</i> Barang dan Dampak dari Praktek <i>DO</i> di Toko Bogi Jaya	61
B. Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik <i>Drop Order</i> Barang di Toko Bangunan Bogi Jaya	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA **LAMPIRAN**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksudkan dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul proposal ini. Adapun judul dari proposal ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Praktek Drop Order Barang Akibat Wanprestasi”** (Studi di Toko Bangunan Bogi Jaya Gisting Tanggamus). Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb). Sedangkan kata tinjauan menurut bahasa berasal dari kata “tinjau” yaitu berarti pandangan atau pendapat sesudah mempelajari atau menyelidiki suatu masalah.¹
2. Hukum Islam menurut Hasbi Ash-Shiddiqy tidak lain dari pada fiqih Islam atau syariat Islam yaitu koleksi daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²
3. Dampak menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).³

¹Deprtemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka. 1990), h.951.

²Sofyan A.P.Kau dan Zulkarnain Suleman, Eksestensi Hukum Adat Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI), *Jurnal Al-Adalah* (Fakultas Syariah IAIN RIL Vol.XIII, No. 2, Desember 2016), hal.166.

4. Praktek Menurut Kamus Bahasa Indonesia praktek adalah melaksanakan sesuatu secara nyata seperti apa yang disebutkan dalam teori.⁴
5. *Drop Order* merupakan suatu sistem transaksi dengan cara pembeli membayar dimuka untuk barang-barang yang diinginkannya sebagai tanda jadi atas pembelinya hingga waktu yang disepakati, sehingga nantinya barang tersebut akan diserahkan oleh penjual.⁵ *Drop order* ini berlaku dalam hal jual beli barang bangunan. Serta adanya pernyataan tersebut melalui faktur yang penjual buat dan memberikannya kepada pembeli atas dasar bahwa transaksi tersebut terjadi.
6. Wanprestasi adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.⁶

Jadi secara keseluruhan dapat dipahami yang dimaksud dengan judul tersebut adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Praktek *Drop Order* Barang Akibat Wanprestasi yang dilaksanakan oleh toko Bogi Jaya Gisting Tanggamus.

B. Alasan Memilih Judul

Pada dasarnya terdapat dua alasan dalam pemilihan suatu judul penelitian, alasan memilih judul “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Praktek *Drop Order* Barang Akibat Wanprestasi**” yaitu:

³Deprtemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka. 1990), h.23.

⁴Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta : Modern English Press, 1991),h.1442

⁵[Http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-drop-order/](http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-drop-order/) , 9 Mei 2018

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa. 1991), h. 46.

1. Alasan Objektif

- a. Kegiatan jual beli dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari kebutuhan yang diinginkan. Bahkan jual beli itu sendiri sekarang cenderung fleksibel dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dikalangan masyarakat seperti jual beli bahan bangunan secara *Drop Order* yang menyerupai akad *salam* (pesanan). Jual beli ini merupakan suatu akad dengan pengiriman pemesanan barang oleh penjual pada waktu yang telah ditentukan dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli saat akad berlangsung. Namun pada pelaksanaannya terkadang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli sebagaimana kasus di Gisting Tanggamus.
- b. Penulisan ini perlu dikaji secara teoritis fiqih karena fakta di masyarakat sudah banyak menggunakan sistem *drop order* dalam kegiatan jual beli seperti yang terjadi di Toko Bangunan Bogi Jaya di Gisting Tanggamus.

2. Alasan Subjektif

- a. Permasalahan judul sesuai jurusan yaitu Muamalah, yang mengkaji beberapa transaksi dalam Islam termasuk tentang *drop order*
- b. Tersedianya data-data, literatur, serta lokasi penelitian yang mudah dijangkau oleh peneliti.

C. Latar Belakang Masalah

Prinsipnya jual beli hukumnya halal selama tidak melanggar aturan-aturan yang telah menjadi syariat Islam, bahkan usaha perdagangan itu dianggap sah apabila dilakukan dengan jujur, amanah, tepat menimbang, saling

menguntungkan, tidak ada unsur menipu antara satu dengan yang lain dan benar-benar berdasarkan prinsip syariat Islam.

Salah satu unsur yang harus ada dalam transaksi jual beli adalah *al-mabi'* (benda yang diperjual-belikan). Syarat benda yang bisa dijual-belikan adalah memiliki manfaat. Hanya benda-benda yang bermanfaat saja yang dapat diperjual-belikan, sebab tujuan dari jual beli tak lain adalah untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan serta penggunaan benda yang diperjual-belikan.

Transaksi jual beli itu sendiri ada bermacam-macam, seperti jual beli yang dilakukan masyarakat sekarang ini cenderung fleksibel dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan *tasarruf* di kalangan masyarakat. beberapa bentuk transaksi yang dikembangkan dan telah mendapat legalisasi menurut *syar'i* seperti jual beli *salam* dan *istishna'*. Jual beli *salam* merupakan suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang didepan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian untuk waktu yang di tentukan. Namun sekarang ini tetap banyak bentuk jual beli yang tetap dikembangkan karena tuntutan keadaan dan kecendrungan masyarakat untuk melakukan transaksi seperti itu, hal ini dapat dicermati pada keinginan masyarakat melakukan jual beli secara *on-line* dan *Drop Order*.

Drop Order dalam masyarakat dikenal sebagai suatu system pembelian barang dengan memesan dan membayar terlebih dulu diawal, sebagai bukti bahwa transaksi ini telah menjadi sebuah ikatan antara penjual dan pembeli dalam jual beli dengan tenggang waktu tertentu. Selain itu, pihak penjual akan

menyerahkan faktur kepada pembeli atas bahan bangunan apa saja yang telah dipesan. Sistem ini sama halnya dengan jual beli *salam* (jual beli dengan pembayaran dimuka), yaitu pembelian barang yang diserahkan kemudian hari sementara pembayaran dilakukan dimuka.⁷

Jual beli merupakan perangkat yang tak terpisahkan dari seseorang dalam memenuhi kebutuhan yang ingin dicapainya. Cara dalam melakukan transaksi jual beli pun meliputi banyak cara di antaranya adalah dengan menggunakan sistem *drop order* yang artinya suatu sistem transaksi dengan cara pembeli membayar di muka untuk barang-barang yang diinginkannya sebagai tanda jadi atas pembelinya hingga waktu yang disepakati, sehingga nantinya barang tersebut akan diserahkan oleh penjual.

Perkembangan sistem jual beli telah berkembang seiring berkembangnya zaman karena semakin banyaknya kebutuhan sehingga dalam praktiknya pun kurang memperhatikan arti dari jual beli itu sendiri yakni saling memenuhi kebutuhan secara adil. Khususnya yang terjadi di Toko Bangunan Bogi Jaya di Gisting Tanggamus antara pihak pedagang dan pembeli yang telah menggunakan sistem *drop order*, dalam pelaksanaannya sistem *drop order* tidak dijalankan sesuai dengan yang diinginkan,⁸ sehingga pada akhirnya terjadi hal-hal yang dapat menyebabkan ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Contohnya pembeli membatalkan transaksi jual beli bahan bangunan sebelum jatuh tempo yang kemudian pihak pembeli mau mengambil kembali uangnya yang telah digunakan untuk *Drop Order* bahan bangunan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, dipandang unik untuk diteliti dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Tentang

⁷Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.112.

⁸wawancara dengan sugito, *pihak pembeli di toko bangunan* tanggal 15 mei 2018.

Dampak Praktek *Drop Order* Barang Akibat Wanprestasi (Studi di Toko Bangunan Bogi Jaya Gisting Tanggamus)''.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi obyek pembahasan. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek pelaksanaan *drop order* barang di Toko Bangunan Bogi Jaya dan apa dampak dari praktek *DO* tersebut yang apabila menyalahi perjanjian?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang praktek *drop order* barang di toko bangunan Bogi Jaya di Gisting Tanggamus?

E. Tujuan dan Kegunaan dari Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui praktek pelaksanaan *drop order* barang di Toko Bangunan Bogi Jaya dan dampak dari praktek *DO* tersebut apabila menyalahi perjanjian.
 - b. Untuk mengkaji tinjauan hukum Islam tentang praktek *drop order* barang di toko bangunan Bogi Jaya di Gisting Tanggamus.
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi peneliti dan pembaca dalam menambah wawasan pengetahuan tentang praktek *drop order* dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh pihak toko bangunan dengan pihak pembeli.

- b. Sebagai salah satu tugas akhir yang harus dipenuhi setiap mahasiswa sekaligus sebagai isyarat guna memperoleh gelar kesarjanaan atau strata satu (S1) fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Agar Kegiatan-kegiatan praktis dalam penelitian dan penulisan ini terlaksana dan obyektif dan ilmiah, serta mencapai hasil yang optimal, maka sangat diperlukan rumusan-rumusan untuk bertindak dan berfikir menurut aturan-aturan ilmiah yang disebut metode. Metode dalam suatu penelitian merupakan sesuatu yang eksensial, sebab dengan adanya metode, akan dapat memperlancar penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field Research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi lapangan.⁹ Penelitian ini dilakukan di Toko Bangunan Bogi Jaya Gisting Tanggamus.

b. Sifat penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitis. Yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan obyektif, mengenai fakta-fakta, sifat-

⁹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cetakan ketujuh, CV.Mandar Maju, Bandung, 2004, h.132-134.

sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.¹⁰ Sedangkan yang dimaksud dengan analitis sendiri yaitu suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran, dan interpretasi data.¹¹ Dengan demikian, maka dalam penelitian ini hanya melukiskan, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan obyek tanpa menarik kesimpulan umum, kemudian pada akhir pembahasan dilakukan suatu analisis.

2. Sumber Data

Sehubungan dengan penelitian ini maka sumber datanya diperoleh dari :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal obyek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh yang hadir pada waktu kejadian.¹² Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pembeli dan toko Bangunan Bogi Jaya yang berlokasi di Gisting Tanggamus.
- b. Data Sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli.¹³ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari membaca buku-buku, majalah, makalah, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.

¹⁰Kaelan , M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Paradigma, Yogyakarta, 2005, h.58.

¹¹*Ibid.*, h.68.

¹²Louis Gookschalk. *Understanding History A Primer Of Historical Method*. UI Pres, 198, h.32.

¹³*Ibid.*, h.78.

3. Populasi dan Sempel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian mungkin manusia, gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mwnjadi objek penelitian.¹⁴ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemilik atau pemimpin Toko Bangunan Bogi Jaya dan terdapat 4 karyawan di Toko Bangunan Bogi Jaya.

b. Sempel

Sempel adalah contoh yang mewakili dari populasi dan cermin dari keseluruhan objek yang diteliti.¹⁵ Jumlah populasi dalam penelitian ini >100 orang, maka semua populasi dalam penelitian ini akan dijadikan sampel penelitian yaitupenelitian ini berjenis populasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto dalam bukunya “apabila subjeknya <100 orang, maka lebih baik diambil semua sehingga penelitian berupa populasi, selanjutnya jika populasinya >100 orang dapat diambil antara 10-15%. Oleh karena itu, berdasarkan penentuan jumlah sampel yang telah dijelaskan, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pemilik atau pemimpin Toko Bangunan Bogi Jaya GistingTanggamus.

4. Alat Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan ini maka ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut :

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Suatu Pendekatan Praktek*, Renika, Jakarta, 2003,h.10.

¹⁵ *Ibid.*, h.12.

- a. *Observasi* adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki, dalam arti luas observasi sebenarnya tidak terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang gambaran umum praktek jual beli dengan sistem *drop order* di toko bangunan Bogi Jaya yang berhubungan dengan masalah penelitian.
- b. *Interview* adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.¹⁶ Dalam wawancara ini menggunakan wawancara bebas terpimpin dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada yang diwawancarai, untuk dapat memberikan penjelasan yang sesuai dengan data yang akan diperoleh.
- c. Dokumentasi adalah mencari data-data yang mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, dan sebagainya.¹⁷

5. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data yang ada telah terhimpun kemudian diadakan pengolahan data. Langkah-langkah yang ditempuh untuk mengolah data adalah sebagai berikut :

¹⁶Mardalis, *Metode Penelitian Sebagai Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, h.65

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, h.236.

- a. *Editing* adalah pengolahan data dengan melakukan penelitian dan pengecekan terhadap data dan bahan yang masuk, apakah data sudah masuk secara keseluruhan atau belum dan juga apakah data yang tidak dapat dimasukkan kedalam penganalisaan, dengan demikian pengecekan ini adalah untuk mengkonkritkan data yang hendak dianalisa.
- b. *Coding Data* (klasifikasi data) adalah pengelompokan data sesuai dengan jenisnya, jadi data yang ada merupakan hasil dari observasi dan wawancara akan dikelompokkan dalam bentuk grafik, pola, kedudukan, kualitas guna menyimpulkan data tersebut.
- c. *Rekontruksi* adalah penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹⁸

6. Analisa Data

Setelah data terhimpun, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.¹⁹ Setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis, dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif. Maksudnya

¹⁸Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.63.

¹⁹Lexy L. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Keempatbelas, (Bandung: Remaja RosdaKarya, 2001), h. 03.

adalah metode analisa data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Dalam Islam, Perjanjian (*aqad*) secara harfiah berarti ikatan atau peraturan yang dipergunakan dalam arti janji dan juga segala yang menunjukkan ikatan untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu baik sesuai dengan hukum maupun tidak.²⁰ Perjanjian dipergunakan untuk mewujudkan hubungan yang sah antara para pihak, perjanjian juga diartikan sebagai kesepakatan dua belah pihak yang mengharuskan masing-masing yang bersepakat untuk melaksanakan sesuatu ketetapan yang telah disepakatinya.²¹

Menurut segi etimologi, perjanjian adalah pengikatan (*ar-rabthu*) antara dua perkara, baik ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Bisa juga berarti sambungan (*Aqdatun*) dan janji (*al-ahdu*).²² Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qura'an surat Al-Imran ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

²⁰Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Studi Tentang Teori Kad dalam Fikih Mumalah), (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.68.

²¹Ahsin W. Alhafidz, *Kamus fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.43.

²²Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.43.

Artinya: (bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuatnya) dan bertakwa, maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.(QS.Al-‘Imran (3): 76)²³

Istilah *ahdu* dalam Al-Quran mengacu pada pertanyaan seorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh terhadap janji yang dibuat orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat:76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membantunya.²⁴

Menurut terminologi ulama fiqih, perjanjian dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus:

- a. Secara umum, perjanjian dalam arti luas hampir sama dengan pengertian perjanjian dari segi bahasa menurut pendapat. Ulama Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai.
- b. Secara khusus, pengertian perjanjian yang dikemukakan ulama fiqih yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya. Bisa juga berarti pengaitan ucapan salah seorang yang perjanjian dengan yang lainnya secara syara’ pada segi yang tampak dan berdampak pada

²³Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h.98.

²⁴Sohari Ru’fah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor:Raja Grafindo Persada, 1979), h.42.

objeknya.²⁵ Dalam KUHPerdara Pasal 1313 yang berbunyi: perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.²⁶ Sedangkan dalam arti sempit perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.²⁷ Menurut Syamsul Anwar perjanjian adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.²⁸

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan perjanjian (*aqad*) adalah salah satu pengikat serta penguat antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dalam bermuamalah, sehingga tidak akan mengakibatkan persengketaan antara kedua belah pihak, karena adanya bukti nyata yang dapat diperlihatkan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Dasar Hukum Akad

²⁵*Ibid.*, h.43-44.

²⁶R.Subekti, dan R.Tjitrosudibio, *kitab UU Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1999), h.338.

²⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h.290.

²⁸Syamsul Anwar, *Op. Cit.*, h.68.

Dasar Hukum Perjanjian (*akad*) ini sebagaimana yang termuat dalam Q.S. Al-Maidah (5) : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad itu...”²⁹

Menurut Ibnu Abbas, Mujahid dan yang lainnya Firman Allah, “Penuhilah akad-akad itu”, berarti janji-janji.

Janji-janji ialah perkara yang dihalalkan Allah, diharamkan Allah, difardukan, dan ditetapkan Allah di dalam Al-qur’an. Maka janganlah kamu menyiasati dan melanggarnya.³⁰ Kemudian, Allah menegaskan hal itu dengan firman-Nya:

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

Artinya: “Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk Jahnnam.” QS.Ar-Ra’d (13) :25.³¹

²⁹ Departemen Agama RI, *Mushab Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 106.

³⁰ Muhammad Nasib Ar-Rifai, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.10.

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa memenuhi perjanjian yang pernah dilakukan atau disepakati adalah wajib hukumnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. QS.An-Nisa (4) :29³²

Menyempurnakan perniagaan dapat dilakukan dengan adanya unsur keterbukaan, kejelasan, dan keadilan, serta kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan sebuah perniagaan maupun transaksi. Keberadaan perjanjian menjadi sebuah kewajiban, untuk menegaskan sebuah transaksi yang sah. Unsur kerelaan menjadi penting di perhatikan, sebab manakala terdapat unsur keterpaksaan dalam sebuah perjanjian, akan mencederai transaksi tersebut.

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad (perjanjian) itu ada empat³³, yaitu:

³² Ibid, h.83.

³³ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), h.54.

- 1) *Al-'aqidan* ialah para pihak yang membuat perjanjian yaitu dua orang atau lebih. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan perjanjian sehingga perjanjian tersebut dianggap sah. Kelayakan yaitu: pertama, bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kedua, bebas memilih. Tidak sah perjanjian yang dilakukan orang di bawah paksaan, kalau paksaan itu terbukti. Ketiga, perjanjian itu dapat di anggap berlaku bila tidak memiliki pengandaian yang disebut *khiyar* (hak pilih).
- 2) *Ma'qud'alaih* ialah benda-benda yang diadakan, seperti benda-benda yang dijual dalam perjanjian jual beli, dalam perjanjian *hibah* (pemberian), dalam perjanjian gadai, hutang yang dijamin seseorang dalam perjanjian *kafalah*.
- 3) *Maudhu' al-aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan perjanjian.³⁴
- 4) *Shighat al-aqd* ialah ijab dan qabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang melakukan perjanjian sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan perjanjian, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang melakukan perjanjian pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.

³⁴Trisadin P. Usanti, Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2015), h.48.

b. Syarat Akad

Para fuqaha menjelaskan bahwa ada beberapa syarat perjanjian, yaitu syarat terjadinya perjanjian, syarat sah, syarat pelaksanaan, dan syarat keharusan.³⁵ Tujuan dari adanya syarat-syarat tersebut adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan (*al-munaza'at*) dan terciptanya *kemaslahatan* bagi para pihak yang melakukan perjanjian.

1) Syarat terjadinya perjanjian

Syarat terjadinya perjanjian adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya perjanjian yang sesuai menurut syara'. Apabila tidak memenuhi syarat tersebut perjanjian menjadi batal. Syarat ini terbagi kepada dua bagian, yaitu yang bersifat umum, yaitu rukun-rukun yang harus ada pada setiap perjanjian, seperti orang yang melakukan perjanjian, objek perjanjian, objek tersebut bermanfaat, dan tidak dilarang oleh syara'. Yang dimaksudkan bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang harus ada pada sebagian perjanjian dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya, seperti syarat harus adanya saksi pada perjanjian atau akad nikah (*'aqd al-jawaz*) dan keharusan penyerahan barang atau objek perjanjian pada *al-'uqud al'ainiyyah*.

³⁵Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), h.40.

2) Syarat sah perjanjian

Syarat sah perjanjian adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin keabsahan dampak perjanjian.³⁶ Secara umum para fuqaha menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah tidak terdapat 6 hal perusak sahnya (*mufsid*) dalam perjanjian, yaitu *Al-jilalah* (ketidak jelasan tentang harga, jenis, dan spesifiknya, waktu pembayaran atau lamanya opsi, dan penanggung atau yang bertanggung jawab), *Al-ikrah* (keterpaksaan), *tauqif* (membatasi kepemilikan terhadap suatu barang), *Al-gharar* (ada unsur ketidak jelasan atau fiktif), *Al-dharar* (ada unsur kemudharatan), dan *Al-syarathul fasid* (syarat-syaratnya rusak, seperti pemberian syarat terhadap pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih murah).³⁷

3) Syarat pelaksanaan perjanjian

Dalam pelaksanaan perjanjian ada dua syarat, yaitu kepemilikan (*al-milk*) dan kekuasaan atau kewenangan (*al-wilayah*). Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, sehingga ia bebas melakukan aktivitas dengana apa yang dimilikinya tersebut sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan atau kewenangan adalah kemampuan seseorang dalam mendaya gunakan (*tashar-ruf*) sesuatu yang dimilikinya sesuai

³⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), h.49.

³⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana, 2012), h.74-75.

dengan ketetapan syara', baik secara langsung *aklain* (wakil). Seseorang *fudhuli* (pelaku tanpa kewenangan), seperti menjual barang milik orang lain tanpa izinnya, adalah sah tindakannya, tetapi akibat hukum tindakan itu dapat dilaksanakan karena adanya *maukuf*, yaitu tergantung kepada ratifikasi pemilik barang. Apabila pemilik kemudian mengizinkan, akibat hukum tindakan tersebut dapat dilaksanakan tanpa membuat perjanjian baru.

4) Syarat kepastian hukum

Dasar dalam perjanjian adalah kepastian. Diantara syarat kepastian (*luzum*) adalah terhindarnya dari beberapa opsi (*khiyar*), seperti khiyar syarat, khiyar aib, dan lainnya. Jika masih terdapat syarat opsi ini dalam transaksi, maka perjanjian tersebut belum memiliki kepastian (*luzum*) dan karenanya transaksi itu dapat menjadi batal.

4. Macam-macam Akad

Perjanjian dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tinjauan sifat pembagiannya. Perjanjian yang dapat dilaksanakan tanpa bergantung kepada hal-hal lain dapat dibagi dua, yaitu yang mengikat secara pasti tidak boleh dibatalkan (*fasakh*), dan yang tidak mengikat secara pasti dapat dibatalkan (*fasakh*), oleh dua pihak atau oleh satu pihak.³⁸ Berikut adalah penjelasan singkat pembagian macam-macam perjanjian tersebut:

³⁸Fathurrahman Djamil, *Op.Cit.*, h.42-43.

a. Perjanjian menurut tujuan terbagi

1) Perjanjian *Tabarru* yaitu perjanjian yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari “*return*” ataupun motif. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah *hibah, wakaf, wasiat, ibra', wakalah, kafalah, hawalah, rahn, dan qirad*. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.³⁹

2) Perjanjian *Tijari* yaitu perjanjian yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah terpenuhi semuanya. Perjanjian yang termasuk dalam kategori ini ialah *murabahah, salam, istishna'* dan *musyarakah*. Perjanjian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial.⁴⁰

b. Perjanjian dilihat dari segi keabsahan

1) Perjanjian *Shahih*

Perjanjian *shahih* adalah perjanjian yang memenuhi rukun dan syaratnya. Hukum dari perjanjian *shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan

³⁹Diwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013), h.66.

⁴⁰Mardani, *Op. Cit.*, h.77.

perjanjian itu dapat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian.⁴¹

2) Perjanjian tidak *shahih*

Perjanjian tidak *shahih* adalah perjanjian yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum perjanjian itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian tidak sah ini, menurut ulama Hanafiyah terbagi dua, yaitu perjanjian yang batal (*bathil*) dan perjanjian yang rusak (*fasad*). Perjanjian *bathil* adalah perjanjian yang tidak memenuhi salah satu rukun atau ada larangan dari syara', sedangkan perjanjian *fasad* adalah perjanjian yang pada dasarnya dibenarkan, namun sifat dari objek perjanjian itu tidak jelas, atau perjanjian yang telah memenuhi rukun dan syarat perjanjian, tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan perjanjian. Menurut ulama Hanafiyah terdapat 4 (empat) sebab yang menjadikan *fasid* nya suatu perjanjian meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, yaitu penyerahan yang menimbulkan kerugian, *gharar*, syarat-syarat *fasid* dan *riba*.⁴²

⁴¹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h.56.

⁴²Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2007), h.108.

c. Perjanjian berdasarkan penamaa

1) Perjanjian Bernama

Merupakan perjanjian yang penamaanya telah disebutkan dan diterangkan ketentuannya oleh syara'.maksudnya secara jelas telah disebutkan dalam al-quran dan hadis. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, bentuk perjanjian ini ada sekitar 25 bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut adalah *ba'i* (jual beli), *ijarah* (sewa-menyewa), *kafalah* (penanggungan), *hawalah* (perpindahan utang), *rahn* (gadai), *bai al-wafa* (jual beli dengan hak penjual untuk membeli kembali barangnya), *al-'ida/wadi'ah* (titipan), *al-i'arah* (pinjaman), *hibah*, *aqd al-qismah* (pembagian harta campuran), *syirkah* (kerja sama usaha). *Mudharah* (kerja sama modal dan kerja), *muzaraah* (investasi dalam pertanian), *musaqah* (investasi dalam perpoohonan), *wakalah* (perwakilan), *shulh* (perdamaian), *tahkim* (arbitrase), *mukharajah* atau *al-takharuj* (menjual bagian harta warisan), *qard* (pinjaman barang), *aqdul umari* (pemberian sepanjang umur), *aqdul muqalah/ aqdul wala'* (saling menanggung dalam hartaharta untuk yang tidak punya ahli waris), *aqdil iqalah* (kesepakatan para pihak untuk menghapuskan perjanjian), *zawaj* atau nikah (pernikahan), *aqdul wahiyyah* (wasiat), dan *aqdul isha* atau *al-wishya*

(penunjukan seseorang untuk menggantikan kedudukannya dalam hak anak-anak dan hartanya, setelah ia wafat).

2) Perjanjian tidak bernama

Merupakan perjanjian yang belum dinamai syara', tetapi muncul dalam perjanjian sejarah umat Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, seperti *istishna*, *bai al-wafa*, *bai istijraj*, dan *al-tahkir*. Perjanjian tidak bernama ini biasanya didasarkan pada dalil hukum berupa *urf*, *istishna*, *qiyas*, dan *masalah mursalah*. Akan tetapi akhirnya ini menjadi bernama.⁴³

d. Perjanjian berdasarkan zatnya

1) Perjanjian terhadap benda yang berwujud ('Ainiyyah)

Sesuatu perjanjian dianggap sah apabila benda atau objek perjanjian tersebut telah diserahkan terimakan. Apabila objek perjanjian ini tidak atau belum diserahkan, maka perjanjian ini dianggap keabsahannya belum sempurna. Perjanjian yang termasuk *uqud al-ainiyyah* ini adalah *hibah*, *'ariyah*, *wadi'ah*, *qiradh*, dan *rahn*.⁴⁴

2) Perjanjian terhadap benda tidak berwujud (Ghai Al-'Ainiyyah)

Sesuatu perjanjian dianggap sah setelah terjadinya *shighat* (ijab-qabul) sekalipun objek akadnya belum diserahkan

⁴³*Ibid.*,

⁴⁴Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.49.

terimakan. Cakupan perjanjian ini adalah semua perjanjian selain dari yang lima sebagaimana disebutkan sebelumnya.

e. Perjanjian berdasarkan watak atau sifat atau pengaruh perjanjian (*Atsar Al-Aqd*)

1) Perjanjian *Munjiz*

Perjanjian yang mempunyai akibat hukum seketika setelah terjadi ijab dan qabul. Dengan kata lain, perjanjian yang tidak digunakan pada syarat atau sandaran waktu yang akan datang. Perjanjian sudah dipandang selesai, seperti dalam perjanjian jual beli, sewa-menyewa, dan sebagainya dengan adanya ijab qabul dari pihak-pihak yang bersangkutan maka selesailah perjanjian dimaksud. Masing-masing pihak terkena kewajiban-kewajiban setelah adanya ijab dan qabul tersebut.

2) Perjanjian *mudhaf'ila al-mustaqbal*

Perjanjian yang disandarkan kepada waktu yang akan datang. Jika suatu perjanjian tidak dilaksanakan seketika, maka ada dua kemungkinan yaitu bersandar kepada waktu mendatang atau bergantung atas adanya syarat.⁴⁵ Perjanjian bersandar kepada waktu yang akan datang biasanya terjadi dalam perjanjian sewa-menyewa rumah. Pesan untuk naik kereta api dengan pembayaran dua hari sebelumnya, termasuk perjanjian macam ini. Perjanjian bersandar tersebut dipandang sah dan telah sempurna, serta menimbulkan

⁴⁵*Ibid.*,

akibat-akibat hukum karena terjadi atas kerelaan dua belah pihak dan tidak bertentangan hukum nash Al-Qur'an dan hadist.

3) Perjanjian *Mu'allaq*

Perjanjian yang digantungkan atas adanya syarat tertentu. Perjanjian dipandang terjadi dengan bergantung kepada adanya syarat tertentu dan syarat tersebut terpenuhi. Misalnya, seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk membeli sesuatu barang dengan harga tertentu, bila tiba-tiba barang yang memenuhi syarat itu ada, wakil dapat membelinya atas nama yang mewakilkan, atau seseorang berkata "saya jual mobil ini dengan syarat saya boleh memakainya selama sebulan, setelah itu akan saya serahkan kepada anda". Kedudukan hukum atas perjanjian *mu'allaq* ini, yaitu bahwa perjanjian ini dianggap sah atau telah terjadi perjanjian, pada saat terpenuhinya syarat yang dibuat. Namun perjanjian *mu'allaq* ini dianggap tidak sah perjanjiannya, apabila syarat tersebut antara lain berupa menghalangi terlaksananya rukun dengan sebaik-baiknya. Misalnya, perjanjian *bai' al-'inah*. Perjanjian ini dilarang karena dianggap sebagai jalan belakang untuk melaksanakan riba (*hilah al-riba*).⁴⁶

⁴⁶Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Op. Cit.*, h.47.

5. Asas-asas Akad

a. Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam dan merupakan prinsip dasar pula dari hukum perjanjian.⁴⁷ Pihak-pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi materi atau isi yang diperjanjikan, menentukan pelaksanaan dan persyaratan lainnya, melakukan perjanjian dengan siapa pun, maupun bentuk perjanjian termasuk menetapkan cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan membuat perjanjian ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam.⁴⁸

b. Persamaan atau kesetaraan (*Al-Musawah*)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dan lainnya karena setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perjanjian. Pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing di dasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan ini. Tidak boleh ada suau kezaliman yang dilakukan dalam perjanjian ini.

⁴⁷Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Prena Damedia Group, 2004), h.3.

⁴⁸Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Prena Damedia Group, 2004), h.3.

c. Keadilan (*Al-'adalah*)

Keadilan adalah salah satu sifat Tuhan dan Al-quran menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral. Pelaksanaan asas ini dalam perjanjian, dimana para pihak yang melakukan perjanjian dituntut untuk berlaku benar dalam pengukapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral maupun materiil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang berlandaskan pada syariah Islam.⁴⁹ Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia yang disebut juga kedzaliman. Beberapa hal yang termasuk dalam kezaliman, antara lain adalah *riba*, timbangan yang tidak adil, penangguhan pembaiaran hutang bagi yang mampu, dan banyak lagi lainnya.

d. Kerelaan atau *konsensualisme* (*Al-Ridhaiyyah*)

Dasar asas ini adalah kalimat antara *dhin minkum* (saling rela diantara kalian). Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Bentuk kerelaan dari para pihak tersebut telah wujud pada saat terjadinya kata sepakat tanpa perlu dipenuhinya

⁴⁹Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Robani Press, 1977), h.396.

formalitas-formalitas tertentu. Kerelaan antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian dianggap sebagai persyaratan bagi terwujudnya semua transaksi.

e. Kejujuran dan kebenaran (*Ash-Shidq*)

Kejujuran adalah satu nilai etika yang mendasar dalam Islam. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu, dan melakukan pemalsuan. Pada saat asas-asas ini tidak dijalankan, maka akan merusak pada legalitas perjanjian yang dibuat.

f. Kemanfaatan (*Al-manfaat*)

Asas manfaat maksudnya adalah bahwa perjanjian yang dilakukan oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*). Islam mengharamkan perjanjian yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat *mudharat* atau *mufsadat*, seperti yang tidak bermanfaat apalagi yang membahayakan.⁵⁰

g. Tertulis (*Al-kitabah*)

Asas ini mengisyaratkan agar perjanjian yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan

⁵⁰Yusuf Qardhawi, *Ibid.*,

perjanjian, sehingga perjanjian itu harus dibuat secara tertulis (*kitabah*). Asas *kitabah* ini terutama dianjurkan untuk transaksi dalam bentuk tidak tunai (kredit). Disamping itu juga diperlukan adanya saksi-saksi (*syahadah*), *rahn*, dan prinsip tanggung jawab individu.

6. Berakhirnya Akad

Suatu perjanjian dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam perjanjian gadai misalnya, perjanjian dipandang telah berakhir apabila hutang telah dibayar.⁵¹

Selain telah tercapai tujuannya, perjanjian dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhirnya waktu.⁵²

Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:⁵³

- a. Di-*Fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebutkan dalam perjanjian rusak.
- b. Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat, atau majelis.
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas perjanjian yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*.
- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya perjanjian tidak dipenuhi oleh pihak bersangkutan.

⁵¹Mardani, *Op. Cit.*, h.99.

⁵²*Ibid.*, h.100.

⁵³FathurramanDjamil, *Op. Cit.*, h.59.

- e. Karena habis waktunya, lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu, maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batallah perjanjian yang telah diadakan oleh para pihak.⁵⁴

Firman Allah SWT, dalam surat At-Taubah (9): 4

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun(dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Q.S.At-Taubah (9) :4⁵⁵

Ayat diatas merupakan pengecualian dari penetapan masa pemberian tangguh selama empat bulan bagi orang yang memiliki perjanjian mutlak dengan nabi Muhammad SAW. Tanpa ditentukan waktunya. Maka, akhir perjanjian itu, seperti telah dikemukakan adalah selama empat bulan. Pada masa itu orang musyrik dapat berpergian dimuka bumi guna menyelamatkan dirinya kemanapun yang dikehendaki, kecuali

⁵⁴Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2004), h.4.

⁵⁵Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 187.

bagi orang yang memiliki perjanjian yang ditentukan, maka batas akhirnya ialah sampai habis waktu yang ditentukan itu. Barang siapa yang memiliki janji dengan Nabi Muhammad SAW. Maka batas akhir perjanjian itu hingga waktunya habis dengan syarat orang yang berjanji tidak mengingkari janjinya.⁵⁶ Oleh karena itu. Allah Ta'ala mendorong supaya memenuhi janji dengan tepat. Maka, Allah berfirman: “sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang memenuhi janjinya.

- f. Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang
- g. Karena kematian.

B. Jual Beli Salam

1. Pengertian Jual Beli *Salam*

Jual beli pesanan (*indent*) dalam fiqih Islam disebut *as-Salam* (اسلم) bahasa penduduk *Hijas* atau *as-Salaf* bahasa penduduk Irak, secara terminology para ulama fiqih mendefinisikannya dengan :

بَيْعٌ أَجَلٍ بِعَاجِلٍ، أَوْ بَيْعٌ ثَيِّعٍ مَوْصُوفٍ فِي الزَّمَةِ أَيْ أَنَّهُ يَتَقَدَّمُ فِيهِ
رَأْسُ الْمَالِ وَيَتَأَخَّرُ الْمَشْمُونُ أَجَلٍ.

menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran

⁵⁶Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, *Op. Cit.*, h.401

modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.⁵⁷

Mardani memberikan contoh dengan perkataan *asalam ath-thauba lil-khiyaat*, artinya ia memberikan atau menyerahkan pakaian untuk dijahit. dikatakan *salam* karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. dikatakan *salam* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. *salam* termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya.⁵⁸

Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani dalam jurnal mengambil beberapa pengertian *salam* yang dikemukakan dari beberapa orang pertama, oleh kamaluddin bin al-Hamman dari mazhab Hanafi mengatakan bahwa sesungguhnya pengertian *salam* menurut syara' adalah jual beli tempo dengan tunai. pendapat kedua, dari syafi'iyah dan Hanabilah memberikan definisi bahwa *salam* adalah suatu akad atas barang yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan harga yang diserahkan di majelis akad, kemudian Malikiyah memberikan definisi bahwa *salam* adalah jual beli dimana modal (harga) dibayar muka. sedangkan barang diserahkan di belakang. Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa *salam* adalah salah satu bentuk jual beli dimana uang dan harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum

⁵⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2003), h.143.

⁵⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.113

ada, hanya sifat-sifat, jenis dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.⁵⁹

Pengertian diatas, terdapat beberapa pendapat lagi tentang pengertian *salam* di antaranya yang dikutip oleh Ismail Nawai dari pendapat Zuhaily mengatakan bahwa jual beli *salam* pesanan diantara pembeli (*muslam*) dengan penjual (*muslam ilaih*). Imam nawawi juga mengutip pendapat dari Al-Jazairi yakni mengemukakan bahwa jual beli dengan system *inden* (*salam*) ialah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Contohnya, orang muslim membeli komoditi dengan cirri-ciri tertentu, misalnya mobil, rumah, makanan, hewan dan lain sebagainya yang akan diterimanya pada waktu tertentu. Ia bayar harganya dan menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima komoditi tersebut, jika waktunya telah tiba penjual menyerahkan komoditi tersebut kepadanya.⁶⁰

Menurut Dewan Syariah Nasional dalm Fatwa DSN No.05/DSN-MUI/IV/2000, *salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.⁶¹ Menurut Bank Indonesia, *salam* adalah akad jual beli barang pesanan (*muslim fiih*) antara pembeli (*muslam ilayhi*). spesifik dan harga barang pesanan

⁵⁹Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia, *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII. No. 4, Desember 2015, hal. 789.

⁶⁰Ismail Nawawi, *Fiqih Mu'amalah Klasik dan Kontemporer*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.214.

⁶¹Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalm Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.132.

disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan dimuka.⁶² Sedangkan dalam komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.⁶³

2. Landasan Hukum Jual Beli Salam

Jual beli dengan sistem pesanan (*salam*) telah diperbolehkan, dengan berlandaskan pada firman Allah SWT dan Rasulullah SAW.⁶⁴

Berikut dalil QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.⁶⁵

Ibnu Abbas ra. Berkata: “Aku bersaksi bahwa *Salam* dalam jaminan hingga waktu tertentu telah dihalalkan dalam Al-Qur'an.”

Kemudian Beliau membacakan ayat ini. Menurut Ibnu Abbas *salam* yang terjamin barangnya halal.⁶⁶

Ibnu Abbas ra. Meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW tiba di Kota Madinah, Beliau mendapati penduduknya telah melakukan

⁶²Daftar istilah dalam ”petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syari'ah” (Bogor: Bank Syariah, 2002), h.10.

⁶³KHES, Pasal 20 ayat (34)

⁶⁴Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.153.

⁶⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung:CV Diponegoro, 2012), h.48.

⁶⁶Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syariah Islam*, (Jakarta: GIP, 2006),h.445

praktik *salam*: memesan barang untuk jangka waktu satu sampai dua tahun.⁶⁷

Kemudian berikut dalil hadist nabi Muhammad SAW yang melandasi jual beli *salam*:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ , وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الشَّرِّمَارِ السَّرَقَ وَالسَّنَتَيْنِ , فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرِ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ , وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ , إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.⁶⁸

Dari Ibnu ‘Abbas RA berkata:”Ketika Rasulullah saw tiba di Madinah, mereka (penduduk madinah) mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistem *salaf*, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun kemudian, maka beliau bersabda: “Siapa yang mempraktekkan *salaf* dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang diketahui”.

Berdasarkan hadist tersebut di atas menggunakan kata “*salaf*” tidak dengan *salam*. Namun keduanya memiliki makna yang sama. Kata *salaf* dengan *salam* baik secara wazan maupun makna, memiliki arti pesanan. Disebutkan bahwa kata *salam* merupakan bahasa penduduk Iraq, sedangkan kata *salaf* merupakan bahasa penduduk Hijaz. Adapun menurut istilah, kata *salam* adalah transaksi jual beli dengan cara menyebutkan sifat barang yang dipertanggung dengan

⁶⁷Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Islam: Sebuah Kajian Kontemporer*, (Jakarta: GIP, 2004), h.92.

⁶⁸Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram Min Adillah al-ahkam*, Cet.II, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h.449.

penyerahan barang yang ditunda, sedangkan pembayaran dilakukan pada saat transaksi. *Salam* diperbolehkan dalam Islam.⁶⁹

Selain dari firman Allah Swt dan juga Hadis Nabi Saw, ada juga *ijma'* dan kaidah fiqh yang menjadi pedoman dalam jual beli *Salam*.⁷⁰

a. *Ijma'*

Menurut Ibnu Munzir, ulama sepakat atas kebolehan jual beli dengan cara *salam*. Di samping itu, cara tersebut juga diperlukan oleh masyarakat.

b. Kaidah Fiqh

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا..

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁷¹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam

a. Rukun Jual beli salam

Dalam melaksanakan jual beli *salam*, maka harus dipenuhi beberapa rukun. Adapun rukun jual beli *salam* menurut Wahbah Az-Zuhailly yaitu:⁷²

⁶⁹Muhammad bin Ismail Al-‘Amir As-San’ani, terj. Ali Nur Medan dkk, *Subulus Salam Sharh Bulughul Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2009), h.4

⁷⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Op, Cit.* H.119-120

⁷¹*Ibid.*,

⁷²Muhammad Syafii Antonia, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.109.

- 1) *Muslim* atau pembeli
- 2) *Muslim Ilayhi* atau penjual
- 3) Modal atau uang
- 4) *MuslimFih* atau barang
- 5) *Sighot* atau ucapan

Adapun rukun jual beli salam menurut Jumhur ulama, selain hanafiyah, terdiri atas.⁷³

- a) orang yang berakad harus baligh dan berakal
- b) objek jual beli salam, yaitu barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, waktu harus jelas, dan harganya harus jelas serta diserahkan diwaktu akad.
- c) Ijab dan qabul

b. Syarat Bai' al-Salam

Selain beberapa rukun yang harus dipenuhi, *bai' al-salam* juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun. Berikut ini akan diuraikan syarat dari rukun-rukun di atas:

- 1) Pihak yang berakad

Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pembeli (*muslam*) dan penjual (*muslim ilaih*) yakni kedua pihak yang bersangkutan telah 'aqil dan baligh (cakap hukum), serta tercapai ridho kedua belah pihak dan tidak ingkar janji.⁷⁴

⁷³H.Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.149.

⁷⁴Ahmad Ifham, *Bedah Akad Pembiayaan Syariah*, (Depok: Herya Media, 2015), h.352.

2) Modal transaksi *bai' al-salam*

Syarat yang harus dipenuhi dalam modal *bai' al-salam* adalah sebagai berikut:⁷⁵

a) Modal harus diketahui

Barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas dan jumlahnya. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai.

b) Penerimaan pembayaran *salam*

Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran *salam* dilakukan di tempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh *al-muslim* (pembeli) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran *salam* tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari *muslamilayhi* (penjual) hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme *salam*.

3) *Al-muslim fihi* (barang)

Di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *al-muslim fihi* atau barang yang ditransaksikan dalam *bai' al-salam* adalah sebagai berikut:⁷⁶

a) Harus spesifikasi dan dapat diakui sebagai utang

b) Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang

⁷⁵Muhammad Syafii Antonia, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.109-110.

⁷⁶*Ibid.*,

tersebut (misalnya beras atau kain), tentang klasifikasi kualitas (misalnya kualitas utama, kelas dua atau ekspor), serta mengenai jumlahnya.

- c) Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari. Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada suatu waktu kemudian, tetapi mazhab Syafi'i membolehkan penyerahan segera.
- d) Bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang.
- e) Tempat penyerahan pihak-pihak yang berkontrak harus menunjuk tempat yang disepakati dimana barang harus diserahkan. Jika kedua pihak yang berkontrak tidak menentukan tempat pengiriman, barang harus dikirim ketempat yang menjadi kebiasaan, misalnya gudang si penjual atau bagian pembelian si pembeli.⁷⁷
- f) Penjual *muslamfihi* sebelum diterima, jumhur ulama melarang penjualan ulang *muslamfihi* oleh *muslailaih* sebelum diterima oleh *muslam*. Para ulama sepakat, *muslam ilaih* tidak boleh mengambil keuntungan tanpa menunaikan kewajiban dan juga menyerahkan *muslamfihi*. Imam malik setuju jumhur ulama tersebut bila *muslamfihi* itu berbentuk makanan. Tetapi jika *muslamfihi* itu bukan makanan, imam malik membolehkan

⁷⁷*Ibid.*,

penjualan kembali barang tersebut sebelum diterima pembelinya asalkan memenuhi persyaratan sebagai berikut.⁷⁸

- 1) Jika barang tersebut lalu bisa dijual kembali kepada *muslam ilayhi*, harga penjualannya haruslah sama dengan harga kontrak semula atau lebih rendah.
 - 2) Jika barang tersebut dijual kepada pihak ketiga, harga jualnya boleh lebih tinggi atau rendah dari semula tergantung kualitas.
- g) Penggantian barang (*muslam fihi*) dengan barang yang lain.

Para ulama melarang penggantian *muslam fihi* dengan barang lainnya. Penukaran atau penggantian barang *al-salam* ini tidak diperkenankan, karena meskipun belum diserahkan, barang tersebut tidak lagi milik muslim ilayhi, tetapi sudah menjadi milik *muslam (fi al-dhimmah)*. Bila barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifik dan kualitas yang sama, meskipun sumbernya, para ulama membolehkannya. Hal demikian tidak dianggap sebagai jual beli, melainkan penyerahan unit yang lain untuk barang yang sama. Mazhab maliki hanya menyetujui pelarangan penggantian tersebut bila muslim fihi itu adalah makanan. Madzhab ini membolehkan muslimfihi selain makanan dengan beberapa syarat tertentu.⁷⁹

⁷⁸Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.136.

⁷⁹*Ibid.*,

- 1) Jika pembeli menghendaki penggantian muslim fihi tersebut sedangkan barang penggantian itu dibuat muslim ilaih, maka kualitas muslim ilaih yang telah disepakati agar tidak timbul kemungkinan riba al-fadl.
- 2) *Al-Muslam* harus mengambil sendiri barang pengganti supaya tidak mengarah kepada pertukaran hutang dengan hutang. Hubungan antara barang pengganti dan harga harus bebas dari riba.
- 3) Harga jual dan waktu penyerahan harus jelas dan dicantumkan dalam perjanjian serta tidak boleh berubah.⁸⁰
- 4) Lain-lain

Selain beberapa syarat rukun diatas, terdapat syarat lain yang tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan atau perbedaan dalam perjanjian akad, misalnya:

- a) Berkaitan dengan penyerahan, mulanya penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya maka ia (pembeli) tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon). Penjual

⁸⁰Ahmad Ifham, *Bedah Akad*, (Depok: Herya Media, 2015), h.353.

dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, namun penjual tidak boleh menuntut tambahan harga. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan, yakni membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya atau menunggu sampai barang tersedia.⁸¹

b) Pembatalan kontrak, pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.⁸²

c) Biaya administrasi, pembeli (*muslim*) dapat dibebani biaya administrasi sehubungan dengan pengelolaan fasilitas, seperti biaya notaris dan lainnya.⁸³

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 101 sampai dengan 103, syarat *bai' al-salam* adalah sebagai berikut:⁸⁴

1) Jual beli *salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang yang sudah jelas

⁸¹*Ibid.*, h. 356-357

⁸²*Ibid.*, h. 356-357

⁸³Ahmad Ifham, *Op.Cit.*, h.356-357.

⁸⁴*KHES*, pasal 101-103

- 2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan meteran.
- 3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.
- 4) *Bai' al-salam* harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.⁸⁵
- 5) Pembayaran barang dalam *bai' al-salam* dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

4. Perbedaan antara jual beli salam dengan jual beli biasa

Semua syarat-syarat dasar suatu akad jual beli biasa masih tetap ada pada jual beli salam. Namun ada beberapa perbedaan antara keduanya, misalnya:⁸⁶

- a. Dalam jual beli *salam*, perlu ditetapkan periode pengiriman barang, yang dalam jual beli biasa tidak perlu.
- b. Dalam jual beli *salam*, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual, yang mana dalam jual beli biasa tidak boleh dijual.
- c. Dalam jual beli *salam*, hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual, yang dalam jual beli biasa, segala komoditas yang dapat dimiliki bisa dijual, kecuali yang dilarang oleh Al-Qur'an dan hadist.
- d. Dalam jual beli salam pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak, yang mana dalam jual beli biasa pembayaran dapat

⁸⁵*Ibid.*,

⁸⁶Mardani, *Op.cit*, h. 116

ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung.

5. Batalnya Jual Beli Salam

Pada dasarnya batalnya jual beli salam dapat terjadi apabila tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat-syaratnya. Seperti dalam hal objeknya yang tidak sesuai, maka pihak pembeli boleh membatalkannya. Namun, seandainya terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya maka jual beli ini sah dan dapat dilanjutkan sampai tiba waktu penyerahan barangnya ataupun kesepakatan antara para pihak. Selain itu, ada hal lain yang terjadi dalam jual beli salam ini, yaitu pembatalan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berakad yang menyebabkan pihaklain rugi, terlebih lagi ada masa yang belum jatuh tempo dan bahkan ada juga yang sudah jatuh tempo. Dalam Islam sendiri telah diatur, seperti yang dikatakan oleh Mardani dalam bukunya *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah* adalah biasanya adanya keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak. Allah SWT berfirman yang artinya:”.....kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.....”⁸⁷

Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.⁸⁸ Ini disebutkan dalam fatwa DSN-MUI tentang salam tahun 2000 bagian kelima. Seandainya terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, amak persoalannya diselesaikan melalui pengadilan agama sesuai dengan UU No.3/2006 setelah tidak tercapai

⁸⁷Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah, Op.Cit*, h.117

⁸⁸*Ibid.*,

kesepakatan melalui musyawarah. Para pihak dapat juga memilih Basyarnas dalam penyelesaian sengketa.⁸⁹

C. Sistem Drop Order

Tehnik perdagangan dalam segala bidangnya ada bentuk tunai, cicilan, keduanya dalam rangka memberikan kemudahan pada konsumen. Dalam bentuk yang demikian pun terjadi persaingan untuk mendapatkan keuntungan melalui pemenuhan kebutuhan konsumen secara terjangkau. Untuk memberikan kemudahan terhadap pembeli mengenai bahan bangunan yang akan dipesan dan memberikan harga yang relatif murah guna menghindari harga yang relatif tinggi dikemudian hari, maka pihak penjual mengembangkan sistem yang dapat meringankan dan harganya dapat terjangkau oleh semua pihak yang dalam dunia perdagangan disebut dengan *Drop Order* barang.

Drop Order merupakan suatu sistem transaksi dengan cara pembeli membayar di muka untuk barang-barang yang diinginkannya sebagai tanda jadi atas pembeliannya hingga waktu yang disepakati, sehingga nantinya barang tersebut akan diserahkan oleh penjual. *Drop Order* ini berlaku dalam hal jual beli barang bangunan. Serta adanya pernyataan tersebut melalui faktur yang penjual buat dan memberikannya kepada pembeli atas dasar bahwa transaksi tersebut terjadi.⁹⁰

Penerapan sistem *Drop Order* barang ini sudah banyak dilakukan oleh pihak pembeli dengan pedagang dengan maksud untuk mendapatkan harga

⁸⁹Nurul Huda Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.51.

⁹⁰[Http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-drop-order/](http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-drop-order/), 9 Mei 2018

yang relatif murah. Sistem *Drop Order* diterapkan dengan maksud para pihak yang bersangkutan seperti pihak toko dengan pihak pembeli tidak ada yang merasa dirugikan namun saling menguntungkan. Kegiatan tersebut saling berhubungan dalam kegiatan jual beli.

Mengenai kerugian yang mungkin akan ditanggung si pembeli dikemudian hari maka perundang-undangan pun menegaskan pasal 1504 KUHPdt⁹¹ bahwa si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu, sehingga seandainya si pembeli mengetahui cacat itu ia sama sekali ia tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.

Penerapan sistem *Drop Order* barang berbeda-beda tergantung yang telah disepakati masing-masing pihak sebagaimana dijelaskan dalam KUHPdt pasal 1493⁹² “kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa, memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang.”

⁹¹R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, cet.40,h.372.

⁹²*Ibid.*, h,373

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Toko Bangunan Bogi Gisting Tanggamus

1. Sejarah Toko Bogi Jaya

Toko Bogi Jaya merupakan toko usaha milik bapak Sugio dan Ibu Poniem. Toko ini berdiri sejak 2011, berawal dari sebuah ajakan dari salah satu temannya yang memberikan inisiatif ke pada bapak sugio untuk mendirikan sebuah toko bangunan, karena bapak sugio mempunyai tanah yang cukup luas berada di tempat yang cukup strategis yang tidak jauh dari jalan raya, yang bertempat di Jalan Raya Gisting Permai Blok 26 Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.⁹³ Sehingga bapak Sugio tertarik untuk beranjak membuka toko bangunan yang telah disarankan oleh temannya tersebut.

Berawal dari usaha toko kecil yang bermodalkan barang seadanya seperti semen, besi, plaron, dan bahan bangunan yang lainnya yang belum cukup banyak.

Kegiatan transaksi jual beli ini berjalan lancar, bapak Sugio pun menambah barang dagangannya karena semakin banyak permintaan dari para pembeli serta menambah jenis dagangannya yakni kramik, plafon, dan alat elektronik. Seiring berjalan waktu, toko tersebut mengalami perkembangan yang cukup pesat sehingga dalam kurun waktu kurang lebih 7 tahun toko tersebut telah mengalami

⁹³Sugio (Pemilik Toko) hasil wawancara tanggal 14 oktober 2018

perkembangan dan diberi nama toko Bogi Jaya. Toko tersebut kini telah maju dan mempunyai 2 cabang toko yang salah satunya berada di Pasar Wonosobo Kecamatan Kota Agung Barat dan berada juga di daerah Tekad Kabupaten Tanggamus. Bapak Sugio dan Ibu Poniem membangun sebuah rumah yang letaknya tidak berjauhan dari Toko Bogi Jaya yang beralamat di Jalan Raya Gisting Permai Blok 28 Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus yang berada di belakang Toko tersebut.

Semakin meningkatnya perkembangan bisnis dibidang bahan bangunan dan elektronik semakin banyak pula desakan dan permintaan dari para pembeli, salah satunya yaitu pihak pembeli ingin men-*Drop Oder* kan uangnya guna untuk membangun rumah, gedung, jembatan atau yang lainnya. Sehingga Toko Bogi Jaya bekerja sama dengan para Toko bahan bangunan yang lebih besar untuk mengatasi pemesanan barang yang cukup banyak. Jumlah barang di toko Bogi Jaya pun semakin meningkat dari sebelumnya, yakni kurang lebih memiliki barang sebanyak 400 macam barang. Dari jumlah barang tersebut berbeda-beda pemasok, sehingga dalam satu bulan toko akan kedatangan distributor yang berbeda-beda. Toko Bogi Jaya biasanya memesan produk setiap satu bulan kepada distributor karena banyak nya permintaan dari pembeli.

2. Letak Toko Bangunan Bogi Jaya

Letak toko Bogi Jaya berada di Jalan Raya Gisting Permai Blok 26 Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Toko Bogi Jaya terletak di tengah-tengah pemukiman penduduk dan berada di tepi jalan raya.

Bangunan Toko Bogi Jaya didirikan di atas tanah 600m², dan luas bangunan kurang lebih ari 5x10m², dan lokasinya cukup luas. Toko Bangunan Bogi Jaya tidak hanya dikelilingi pemukiman warga, tetapi juga sangat dekat dengan pusat perbelanjaan yaitu bersebelahan dengan pasar induk dan berbatas dari perbatasan antara Kecamatan Kota Agung dengan Kecamatan Gisting. Oleh karena itu Toko Bangunan Bogi Jaya sangat strategis, dan mudah ditemukan.

3. Bentuk Badan Usaha Toko Bogi Jaya

Badan Usaha adalah kesatuan organisasi yuridis, terdiri dari modal dan tenaga yang bertujuan mencari keuntungan. Sedangkan perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengelolaan faktor produksi untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat, serta melakukan usaha nya untuk tujuan memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ciri-ciri badan usaha sebagai berikut :

- a. merupakan kesatuan organisasi
- b. memiliki modal, baik dana maupun tenaga
- c. bertujuan mencari keuntungan

Badan usaha menurut jenis usaha nya dapat digolongkan menjadi 5 :

- a. Badan usaha ekstraktif adalah badan usaha yang kegiatan usahanya mengelola dan mengambil hasil yang disediakan alam, misalnya usaha pertambangan.
- b. Badan usaha agraris adalah badan usaha yang mengambil hasil dari alam dengan mengusahakan dan mengelola tanah terlebih dahulu untuk memperoleh hasilnya, misalnya perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.
- c. Badan usaha perdagangan adalah badan usaha yang membeli produk (barang, jasa, ide) untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk, misalnya toko, pasar swalayan, supermarket, dan lain-lain.
- d. Badan usaha industri adalah bentuk usaha yang membeli bahan baku kemudian mengelola menjadi bahan penolong dan bahan jadi, misalnya pabrik semen, pembuatan tahu tempe, dan lain-lain.
- e. Badan usaha jasa adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dengan memberi jasa berupa kesenangan, kemudahan, kenyamanan, dan fasilitas, misalnya pengangkutan, usaha bioskop, dan usaha pendidikan.

Dari penjelasan diatas, menurut penjelasan bapak Sugio selaku pemilik toko bahwa bentuk usaha Toko Bangunan Bogi Jaya toko ini berbentuk perusahaan perseroan karena dikelola oleh satu orang yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung sendiri, menurut jenis usahanya toko ini termasuk badan usaha perdagangan karena bentuk

usaha ini dengan cara membeli produk (barang, jasa, ide) untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuknya.⁹⁴

B. Mekanisme Jual Beli di Toko Bangunan Bogi Jaya

1. Cara pembayaran di toko Bogi Jaya

Dalam perdagangan alat untuk pembayaran sering dikenal sebagai “*term of payment* “ (syarat pembayaran). Secara umum terdapat empat pembayaran yang masing-masing memiliki resiko dan stabilitas yang berbeda untuk penjual dan pembeli yakni : ⁹⁵

- a. Pembayaran dimuka yaitu pembeli membayar kepada penjual sebelum membawa barang yang dibeli dari penjual
- b. *Letter of credit* yaitu pihak ketiga membayarkan sejumlah uang kepada penjual atas nama pembeli sesuai yang telah disepakati.
- c. *Documentary collection* yaitu sama dengan metode *cash on delivery / COD* yang berarti tunai begitu barang diserahkan.
- d. *Open Account* yaitu penjual dan pembeli sepakat barang dikirim terlebih dahulu dan dibayar setelah barang dikirim.

Pelaksanaan pembayaran *drop order* barang yang di terapkan di toko bangunan bogi jaya menggunakan pembayaran dimuka atau sama hal nya dengan *akad salam* (pesanan). *Salam* sendiri adalah jual beli dimana modal (harga) dibayar muka, sedangkan barang diserahkan di belakang.

⁹⁴Sugio (Pemilik Toko) hasil wawancara tanggal 20 oktober 2018

⁹⁵Edwar G. Hinkelman, *Metode Pembayaran Bisnis*, Jakarta, PPM, 2002, h.12-13

Pada tahap ini pihak pembeli membayar uang tanda jadi kepada pihak pemilik toko yaitu uang yang akan di-*DO* kan nya dengan cara membayarkannya langsung pada saat akad dilangsungkan dan pihak toko akan memberikan faktur kepada pihak pembeli sebagai tanda bukti terjadinya *drop order* barang di toko Bangunan Bogi Jaya.

2. Perjanjian yang diterapkan di Toko Bangunan Bogi Jaya

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁹⁶ Dalam suatu perjanjian tentang isinya, harus ada syarat-syarat tertentu, karena dalam suatu perjanjian menurut ketentuan pasal 1338 KUHPdata ayat satunya menentukan bahwa suatu perjanjian atau persetujuan yang sah adalah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan agar suatu perjanjian bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah adalah bilamana perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu.⁹⁷

Menurut keterangan Bapak Sukamto⁹⁸ selaku lurah menerangkan bahwa perjanjian sangatlah penting bagi 2 orang atau lebih yang melakukan kerjasama demi menjaga keamanan dan kenyamanan dalam kerjasamanya agar tidak terjadi kesalah pahaman dan hal-hal yang dapat merugikan keduanya. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan salah satu pihak maka cara penyelesaian yang pertama dilakukan yakni

⁹⁶Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Yogyakarta: Pustaka Yudistia, 2004),

⁹⁷*Ibid.*,

⁹⁸Wawancara dengan Sukamto, kepala lurah Gisting tanggal 15 oktober 2018

dengan bermusyawarah antara keduanya sampai benar-benar terselesaikan dan diakhiri dengan damai, jika dengan bermusyawarah tidak dapat menyelesaikan masalah, maka kedua nya boleh mengajukan masalah tersebut ke pengadilan.⁹⁹ Dari pihak karyawan menambahkan bahwa perjanjian yang dilakukan antara pembeli dengan toko dilakukan dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, perjanjian ini dilakukan atas dasar sama-sama sepakat, jika terjadi hal-hal yang nantinya dapat merugikan salah satu pihak maka akan diselesaikan dengan jalan musyawarah dan jika dengan jalan musyawarah tidak terselesaikan maka dengan jalur hukum.¹⁰⁰

Pada dasarnya mekanisme jual beli yang ada di toko bogi jaya telah memenuhi syarat-syarat jual beli dengan menggunakan akad *salam* seperti yang telah di paparkan di atas dari segi pembayaran maupun perjanjian cukup jelas.

Gambaran singkat proses dan beberapa tahapan pelaksanaan drop order barang:

a. Tahap pemesanan

Dalam tahap pemesanan ini akan terjadi beberapa hal, yaitu:

- 1) Bertemunya antara kedua belah pihak yakni pembeli dan pihak toko bangunan bogi jaya berhadapan secara langsung. Pihak toko akan melayani dan memberikan penjelasan terkait barang yang ada, seperti semen, besi, kramik, dan sebagainya.

⁹⁹Wawancara dengan Sukamto, kepala lurah Gisting tanggal 15 oktober 2018

¹⁰⁰Wawancara dengan Khusnun khotimah, karyawan toko Bogi Jaya tanggal 13 oktober

2) Akan terjadi suatu kesepakatan, yakni kesepakatan yang dimulai dari pernyataan pemesanan bahan bangunan oleh pihak pembeli dan pihak toko meliputi kesepakatan barang, harga, jumlah dan waktu penyerahan barang. Kesepakatan itu terjadi atas dasar suka sama suka atau saling meridhoi.

3) Akan terjadi proses pembayaran yang pembayarannya sekaligus di awal akad dilangsungkan.

b. Tahap Pengiriman Barang

Dalam memenuhi kewajibannya sebagai penjual bahan bangunan, maka bahan-bahan bangunan yang telah di-DO kan oleh pembeli harus diserahkan oleh pihak penjual pada saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan akad berlangsung. Kesepakatan ini merupakan keridhaan antara pihak pembeli dengan penjual pada saat pembuatan faktur ataupun bon yang dibuat oleh penjual dan diserahkan kepada pembeli.

Dengan demikian, bahan-bahan bangunan yang telah dipesan dulunya harus sudah ada pada saat jangka waktunya telah tiba, dan tugas pekerja pada Toko Bahan Bangunan Bogi Jaya untuk mengantarkan bahan-bahan tersebut ke tempat yang telah disebutkan. Karena ini merupakan salah satu bentuk pelayanan dari sebuah toko untuk mempertahankan citranya yang baik terhadap pembeli.¹⁰¹

¹⁰¹Wawancara dengan Erwin, karyawan toko Bogi Jaya tanggal 15 oktober 2018

C. Pelaksanaan *Drop Order* barang di Toko Bogi Jaya

Pada dasarnya transaksi jual beli itu sendiri ada bermacam-macam, dan salah satunya adalah jual beli bahan bangunan secara *drop order* di toko bangunan Bogi Jaya Blok 26 Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus yang konsepnya sama dengan jual beli *salam*. *Salam* adalah salah satu bentuk jual beli dimana uang dan harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.

Perkembangan sistem *drop order* barang yang ada di toko bangunan Bogi Jaya berkembang dengan pesat seiring dengan waktu. Hasil wawancara dari beberapa karyawan dan pihak toko sebab terjadinya pelaksanaan transaksi jual beli bahan bangunan secara *Drop Order* adalah sebagai berikut

1. Harga relatif murah

Dalam praktek akad jual beli bahan bangunan yang terjadi dalam masyarakat, keadaan keuangan merupakan salah satu kendala bagi setiap masyarakat dalam membeli bahan bangunan tersebut, baik untuk membangun rumah ataupun bangunan-bangunan lainnya. Hal ini dapat diketahui melalui keluhan masyarakat yang mengatakan bahwa bahan bangunan semakin hari cenderung semakin naik.

2. Pembayaran sekaligus di awal

Dalam jual beli bahan bangunan secara *Drop Order* pembeli harus membayar sekaligus saat akad berlangsung. Hal ini merupakan salah

satu kriteria khusus dalam konsep jual beli *salam* dibandingkan dengan jual beli lainnya. Untuk itu pembeli harus mempunyai biaya yang cukup untuk melakukan *Drop Order* bahan bangunan sesuai dengan yang diinginkan karena pembayaran harus diserahkan diawal akad berlangsung dan barangnya akan diserahkan nanti pada saat masa perjanjiannya telah tiba.¹⁰² Hal ini sudah menjadi suatu kebiasaan yang diketahui oleh para masyarakat apabila ingin melakukan *Drop Order* bangunan yang ada di toko bangunan Bogi Jaya.

3. Jangka waktu sesuai dengan kesepakatan

Dalam memenuhi kewajibannya sebagai penjual bahan bangunan maka bahan-bahan yang telah di *Drop Order* kan oleh pembeli harus diserahkan oleh pihak penjual pada saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan akad berlangsung. Kesepakatan ini merupakan keridhaan antara pihak pembeli dengan pihak pemilik toko pada saat pembuatan faktur atau nota yang dibuat oleh pihak toko dan diserahkan kepada pembeli.

Selain itu selama masa perjanjian terhadap *Drop Order* barang tersebut pihak toko tidak meminta biaya untuk pemeliharaan barang-barang tersebut sampai masanya nanti akad berakhir dan barangnya dikirim. Ini semua ditanggung oleh pihak toko Bogi Jaya. Penanggungan ini disebabkan bahan bangunan yang dibutuhkan masyarakat hampir setiap waktunya bagi yang melakukan

¹⁰²Wawancara dengan Sugio, pemilik toko bangunan Bogi Jaya tanggal 14 oktober 2018

pembangunan sehingga tidak harus menyimpannya secara keseluruhan terhadap barang yang di pesan kecuali barang yang langka yang tidak selalu ada pada toko bangunan Bogi Jaya tersebut.¹⁰³

Berdasarkan sebab-sebab terjadinya transaksi jual beli bahan bangunan secara *Drop Order* antara pihak pembeli dan pihak toko, dalam mengadakan perjanjian tersebut tidak dapat dihindari terkadang apabila timbulnya suatu permasalahan di antara kedua belah pihak yang telah melakukan perjanjian.

Dalam praktek pelaksanaan *drop order* yang ada di toko bangunan bogi jaya tidak berjalan dengan apa yang diinginkan yang dimana pihak pembeli membatalkan transaksi *drop order* bahan bangunan sebelum jatuh tempo dengan alasan kebutuhan yang mendesak.

Tindakan yang dilakukan oleh pembeli dalam hal ini telah mendzolimi pihak penjual karena merasa dikecewakan atas alasan yang diberikan berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh pembeli tersebut, seperti pembeli membatalkan transaksi jual beli bahan bangunan sebelum jatuh tempo yang kemudian pihak pembeli mau mengambil kembali uangnya yang telah digunakan untuk *DO* bahan bangunan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhannya yang mendesak. Akan tetapi kenyataannya pembeli berbohong karena ia

¹⁰³Wawancara dengan Uul, karyawan toko bangunan Bogi Jaya tanggal 16 oktober 2018

ingin membeli bahan bangunan tersebut di tempat lain yang diketahui oleh salah satu karyawan toko Bogi Jaya.¹⁰⁴

D. Dampak

Dalam sebuah perjanjian (akad) banyak hal-hal yang terjadi tanpa terduga oleh pihak yang melaksanakan akad, sehingga dapat berdampak pada keuntungan ataupun kerugian terhadap transaksi yang dilaksanakan.

Dampak yang ditimbulkan apabila menyalahi aturan perjanjian menyebabkan kerugian bagi pihak penjual, karena perjanjian yang telah dibuat tidak sesuai dengan kesepakatan bersama pada saat akad berlangsung kemudian tiba-tiba dibatalkan oleh pihak pembeli dengan alasan-alasan tertentu. Hal ini dapat menimbulkan pertikaian dan permusuhan antar pihak penjual dan pembeli, karena seandainya pihak penjual mengetahui terlebih dahulu maka tidak harus memikirkan dan menyimpan bahan-bahan yang telah dipesan tersebut akan tetapi bisa langsung menjualnya bagi siapa saja yang ingin membelinya dikarenakan dalam berbisnis tidak ada yang menginginkan kerugian melainkan keuntungan. Sehubungan dengan penjelasan di atas, pak Sugio¹⁰⁵ masih memperlakukan sistem *DO* bahan bangunan. Namun dengan jangka waktu tidak lebih dari 5 bulan karena mengingat kejadian-kejadian yang telah ia alami sebelumnya dan untuk menghindari permasalahan yang terjadi.

¹⁰⁴Wawancara dengan Ari, karyawan toko bangunan Bogi Jaya tanggal 10 oktober 2018

¹⁰⁵Wawancara dengan sugio, pihak pemilik toko di toko bangunan bogi jaya tanggal 14 oktober 2018

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Praktik Pelaksanaan *Drop Order* Barang dan Dampak dari Praktek DO di Toko Bangunan Bogi Jaya

Toko bahan bangunan Bogi Jaya yang berada di Jalan Raya Gisting Permai Blok 26 Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus adalah toko yang paling besar dan cukup banyak konsumen yang membeli bahan bangunan untuk pembuatan rumah di toko tersebut. Sehingga pihak pembeli menimbulkan keinginan untuk men-*DO* kan uangnya di toko Bogi Jaya untuk pembuatan rumahnya dengan alasan harganya relatif murah, pembayaran sekaligus diawal akad, jangka waktu sesuai kesepakatan.

Sistem pelaksanaan *drop order* barang yang diterapkan di toko bangunan bogi jaya menggunakan *akad salam* (pesanan) yang pembayarannya dilakukan pada saat akad dilangsungkan. *salam* sendiri adalah jual beli dimana modal (harga) dibayar muka, sedangkan barang diserahkan di belakang. Adapun tahapan pelaksanaan *drop order* barang yang dilakukan dengan pembeli dalam melakukan pemesanan melalui beberapa tahap:

1. Tahap pemesanan

Dalam tahap pemesanan ini akan terjadi beberapa hal, yaitu:

- a. Bertemunya antara kedua belah pihak yakni pembeli dan pihak toko bangunan bogi jaya berhadapan secara langsung. Pihak toko

akan melayani dan memberikan penjelasan terkait barang yang ada, seperti semen, besi, kramik, dan sebagainya.

- b. Akan terjadi suatu kesepakatan, yakni kesepakatan yang dimulai dari pernyataan pemesanan bahan bangunan oleh pihak pembeli dan pihak toko meliputi kesepakatan barang, harga, jumlah dan waktu penyerahan barang. Kesepakatan itu terjadi atas dasar suka sama suka atau saling meridhoi.
- c. Akan terjadi proses pembayaran yang pembayarannya sekaligus diawal akad dilangsungkan.

2. Tahap Pengiriman Barang

Dalam memenuhi kewajibannya sebagai penjual bahan bangunan, maka bahan-bahan bangunan yang telah di-DO kan oleh pembeli harus diserahkan oleh pihak penjual pada saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan akad berlangsung. Kesepakatan ini merupakan keridhaan antara pihak pembeli dengan penjual pada saat pembuatan faktur ataupun bon yang dibuat oleh penjual dan diserahkan kepada pembeli.

Dengan demikian, bahan-bahan bangunan yang telah dipesan dulunya harus sudah ada pada saat jangka waktunya telah tiba, dan tugas pekerja pada Toko Bahan Bangunan Bogi Jaya untuk mengantarkan bahan-bahan tersebut ke tempat yang telah disebutkan. Karena ini merupakan salah satu bentuk pelayanan dari

sebuah toko untuk mempertahankan citranya yang baik terhadap pembeli.

Dilihat dari mekanisme pembayaran maupun perjanjian yang diterapkan di toko Bangunan Bogi Jaya tidak mengalami kesalahan apapun, tetapi disini yang menimbulkan masalah yaitu dari pihak pembeli yang sudah men-*DO* kan uangnya, yang kemudian pihak pembeli datang kembali ke toko untuk mengambil uang yang sudah di *DO* kan tersebut dengan alasan kebutuhan yang mendesak.

Tindakan yang dilakukan oleh pembeli dalam hal ini telah mendzolimi pihak penjual karena merasa dikecewakan atas alasan yang diberikan berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh pembeli tersebut, seperti pembeli membatalkan transaksi jual beli bahan bangunan sebelum jatuh tempo yang kemudian pihak pembeli mau mengambil kembali uangnya yang telah digunakan untuk *DO* bahan bangunan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhannya yang mendesak. Akan tetapi kenyataannya pembeli berbohong karena ia ingin membeli bahan bangunan tersebut di tempat lain

Adapun dampak yang ditimbulkan apabila menyalahi aturan perjanjian yang menyebabkan kerugian bagi pihak toko, karena perjanjian yang telah dibuat tidak sesuai dengan kesepakatan bersama pada saat akad berlangsung kemudian tiba-tiba dibatalkan oleh pihak pembeli dengan alasan-alasan tertentu. Hal ini dapat menimbulkan pertikaian dan permusuhan antar pihak penjual dan

pembeli, karena seandainya pihak penjual mengetahui terlebih dahulu maka tidak harus memikirkan dan menyimpan bahan-bahan yang telah dipesan tersebut akan tetapi bisa langsung menjualnya bagi siapa saja yang ingin membelinya dikarenakan dalam berbisnis tidak ada yang menginginkan kerugian melainkan keuntungan.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, pak Sugio¹⁰⁶ masih memperlakukan sistem *DO* bahan bangunan. Namun dengan jangka waktu 5 bulan karena mengingat kejadian-kejadian yang telah ia alami sebelumnya dan untuk menghindari permasalahan yang terjadi.

B. Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik *Drop Order* Barang di Toko Bangunan Bogi Jaya

Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi yang saling menyatu. Hukum yang didasarkan pada suatu filsafat dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dijunjung tinggi dan dijadikan landasan hidup oleh masyarakat dimana hukum itu berlaku. Bagi masyarakat muslim hukum yang di pandang mampu memenuhi citra rasa keadilan adalah hukum Islam. Namun demikian, persepsi masyarakat sendiri tentang hukum Islam sangat variatif.

Hukum Islam dikembangkan dengan sangat menghargai penggunaan akal untuk melakukan ijtihad dengan tetap menghargai dan bahkan mengadopsi nilai-nilai lokal. Keterlibatan akal pikiran

¹⁰⁶Wawancara dengan sugio, pihak pemilik toko di toko bangunan bogi jaya tgl 14 oktober 2018

manusia dalam menjabarkan hukum-hukum menyebabkan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari pengaruh cara pandang manusia, baik secara pribadi maupun sosial. Namun tidak semua cara pandang manusia dapat diwujudkan menjadi hukum Islam. Cara pandang memenuhi sejumlah persyaratan tertentu agar satu pemikiran dapat diterima sebagai sebuah tradisi hukum.

Berdasarkan masalah yang ditemukan di lapangan yang telah dijelaskan pada BAB III, dan merujuk pada BAB II yang dipaparkan sistem *drop order* barang yang ada di toko bogi jaya yang dilakukan oleh pihak toko dan pembeli tidak sesuai dengan tuntunan Islam.

Dalam penjelasan BAB II, syarat sahnya perjanjian harus terhindari dari hal-hali berikut ini :

1. *Al-ikrah* (keterpaksaan)
2. *Tauqif* (membatasi kepemilikan terhadap suatu barang),
3. *Al-Jahalah* (ada unsur ketidak jelasan atau fiktif)
4. *Al-gharar* (ada unsur kemudharatan)
5. *Al-syarathul fasid* (syarat-syaratnya rusak, seperti pemberian syarat terhadap pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih murah)

Dalam prakteknya, pelaksanaan perjanjian Drop Order barang yang ada di toko bangunan bogi jaya mengandung unsur *al-gharar* yaitu adanya unsur *kemudharatan* bagi pihak pemilik toko, *kemudharatan* yang dimaksud adalah kerugian akibat perjanjian yang dilakukan

diawal. Sebab pembeli membatalkan perjanjian drop order untuk mengambil kembali uangnya yang telah digunakan untu di *DO* kan sebelum jatuh tempo.

Berdasarkan analisis di atas dapat dijelaskan terlebih dahulu bahwa akad yang digunakan adalah akad *salam*. Akad *salam* didefinisikan sebagai salah satu bentuk jual beli dimana uang dan harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat. Transaksi *salam* ini hukumnya boleh dan telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa adanya pihak (ulama) yang mengikarinya. Sesuai dengan kaidah fiqih dikemukakan yakni :”Hukum asal dalam segala hal adalah boleh sebelum ada dalil yang membatalkannya dan atau mengharamkannya”.

Dan berlandasan pada firman Allah SWT dan Rasulullah SAW.¹⁰⁷

Berikut dalil Al-Qur’an pada surat Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.¹⁰⁸

¹⁰⁷Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.153.

¹⁰⁸Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h.48

Pada dasarnya pembiayaan *salam* merupakan transaksi jual beli *inden* (pesanan) yang pembayarannya dilakukan di muka secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pembatalan yang dilakukan oleh salah satu pihak pembeli yang men *DO* kan uangnya kepada pihak toko bangunan Bogi Jaya tersebut belum dibenarkan oleh Hukum Islam yang berkaitan dengan pembahasan, ditemukan beberapa kesalahan yaitu: pihak pembeli membatalkan perjanjian sebelum jatuh tempo. Hal ini menyebabkan *kemudharatan* (kerugian) pada pihak pemilik toko dan hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan menganalisa data-data yang diperoleh pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini akan ditarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Adapun kesimpulan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan praktek *drop order* barang di toko bangunan Bogi Jaya yang berada di Jalan Raya Gisting Tanggamus, pada dasarnya sudah ada kesepakatan bersama saat melangsungkan *Drop Order*. Isi dalam perjanjian tersebut bahwasanya barang akan diantar sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Namun dalam prakteknya dilapangan perjanjian tersebut tidak sesuai dengan perjanjian diawal atau teori yang sudah disepakati, dimana pihak pembeli ingin mengambil kembali uang yang telah di *Drop Order* kan untuk bahan bangunan tersebut sebelum jatuh tempo, sehingga kejadian tersebut berdampak pada pihak toko yang mengalami kerugian, baik waktu dan barang.
2. Dalam pandangan Hukum Islam praktek pelaksanaan *drop order* barang yang dilakukan di toko bangunan Bogi Jaya Gisting Tanggamus adalah tidak sesuai dengan hukum Islam, karena jual beli yang dilakukan antara toko Bogi Jaya dengan pembeli mengandung unsur *al-qharar* yaitu ada unsur *kemudharatan* bagi pihak pemilik toko,

kemudharatan yang dimaksud adalah kerugian akibat perjanjian yang dilakukan diawal, Sebab pembeli membatalkan perjanjian *drop order* untuk mengambil kembali uangnya yang telah digunakan untuk di *DO* kan sebelum jatuh tempo. Dalam sistem pelaksanaan *drop order* di toko bangunan Bogi Jaya Gisting Tanggamus, tidak sesuai dengan kontrak/perjanjian diawal akad yang mana pihak pembeli begitu saja membatalkan perjanjian *drop order* yang sudah dilaksanakan dengan alasan tertentu. Dalam hukum Islam perjanjian harus ditepati dan dihormati. Tidak boleh menyalahi salah satu dari hukum-hukum syariat, perjanjian harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, tidak boleh mencurangi salah satu pihak. Agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penulisan ini disampaikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat bagi para pihak yang terlibat, khususnya pihak pemilik toko, yaitu :

1. Untuk mengantisipasi resiko yang terjadi selama pelaksanaan perjanjian, hendaknya ada suatu konsep dan juga prosedur yang tertulis dari pihak toko bangunan dengan jelas yang bisa diberikan kepada pihak pembeli pada saat men-drop orderkan barang sebagai bukti konkrit untuk menghindari adanya pembatalan.
2. Adanya suatu akad yang tertulis dengan jelas dan juga sanksi bagi yang melanggarnya baik itu pihak pembeli maupun pihak toko disertai dengan tanda tangan dari kedua belah pihak yang berakad untuk lebih terbukti. Sehingga jual beli *Drop Order* barang

bangunan tersebut tidak hanya sebatas faktur ataupun bon yang diberikan oleh pemilik toko.



DAFTAR PUSTAKA

- Ab Mumin bin Ab Ghani, Nuraini Eka Rachmawati , Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia, *Jurnal Al-Adalah Vol. XII. No. 4*, Desember 2015.
- Ahmad, Al-Hafizh bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram Min Adillah al-ahkam*, Cet.II, Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Alhafidz, W. Ahsin, *Kamus Fiqih*, Jakarata: Amzah, 2013
- Antonia, S Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ar-Rifai, M. Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Arikunto, Suharsimi, *Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka, 1985.
- , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Daftar istilah dalam ”*Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syari’ah*”, Bogor: Bank Syariah, 2002.
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- , *Al-Qur’an dan Terjemah*, Bandung: CV Diponegoro, 2012.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1990.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Edwar, G. Hinkelman, *Metode Pembayaran Bisnis*, Jakarta: PPM, 2002.

- Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003.
- Huda, Nurul, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ifham, Ahmad, *Bedah Akad Pembiayaan Syariah*, Depok: Herya Media, 2015
- Kaelan, M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Karim, Adiwarman A, *Ekonomi Islam: Sebuah Kajian Kontemporer*, Jakarta: GIP, 2004.
- , *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Kartini, Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cetakan ketujuh, Bandung: CV.Mandar Maju, 2004.
- Louis Gookschalk., *Understanding History A Primer Of Historical Method*. UI Pres, 1998.
- Mardalis, *Metode Penelitian Sebagai Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Mardani , *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Moeloeng, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet Ke-14, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir , *Hukum Perikatan*, Yogyakarta: Pustaka Yudistia, 2004.
- , *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Muhammad bin Ismail Al-‘Amir As-San’ani, terj. Ali Nur Medan dkk, *Subulus Salam Sharh Bulughul Maram*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2009.
- Nawawi, Ismail , *Fiqih Mu’amalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

- Peter, Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, , Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, Cet. 1*, Jakarta: Robani Press, 1977.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Ru'fah A, Sohari S, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Raja Grafindo Persada, 1979.
- , *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Prena Damedia Group, 2004.
- Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta: GIP, 2006.
- Subekti R., R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, cet.40, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
- , *Kitab UU Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta: Prena Damedia Group, 2004.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- S.Nasu, Kaelan , M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Tika, Muhammad Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis* Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Trisadin, P. Usanti, Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, .Jakarta: Bumi Aksara, 2015
- Wajdi, Farid, Suhrawardi Lubis K, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Zulkarnain Suleman, A.P. Sofyan Kau, Eksestensi Hukum Adat Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI), *Jurnal Al-Adalah Vol.XII, No. 2*, Desember 2016